

RESPON TKI TERHADAP PERLINDUNGAN SOSIAL FORMAL TKI

(STUDI DI KABUPATEN CILACAP, JAWA TENGAH)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Dwita Choerunisa

NIM 13250069

Pembimbing:

Noorkamilah, S.Ag, M.Si

NIP 197404082006042002

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-1551 /Un.02/DD/PP.05.3/08/2018

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**RESPON TKI TERHADAP PERLINDUNGAN SOSIAL FORMAL TKI (STUDI DI
KABUPATEN CILACAP, JAWA TENGAH)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dwita Choerunisa
NIM/Jurusan : 13250069/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 23 Agustus 2018
Nilai Munaqasyah : 92 (A -)

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Noorkamilah, S.Ag, M.Si.
NIP 19740408 200604 2 002

Penguji II,

Lathiful Khuluq, Drs, MA, BSW, Ph.D.
NIP 19680610 199203 1 003

Penguji III,

Dr. H. Zainudin, M.Ag.
NIP 19660827 199903 1 001

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Dekan,



Dr. Hj. Nurjannah, M.Si
NIP 19600310 198703 2 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dwita Choerunisa

NIM : 13250069

Judul Skripsi : Respon TKI terhadap Perlindungan Sosial Formal TKI
(Studi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial



Andayani, S.IP, MSW

NIP 197210161999032008

Pembimbing



Noorkamilah, S.Ag, M.Si

NIP 197404082006042002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwita Choerunisa
NIM : 13250069
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Respon TKI terhadap Perlindungan Sosial Formal TKI (Studi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah)”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018
Yang Menyatakan,



Dwita Choerunisa
NIM 13250069

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwita Choerunisa
NIM : 13250069
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya), seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran Ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Menyatakan,

Dwita Choerunisa
NIM 13250069

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua; Bapak M. Sobirin dan Mama Sri Astiyah atas doa dan dukungan
yang tiada henti.

Serta Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

MOTTO

“Then, surely with hardship comes ease. Surely, with hardship comes ease. So when you have finished (with your immediate task), still strive hard, (then toil) And to your Lord turn (all) your attention.”

Inshirah:5-8

“We are spiritual beings whether we want to admit it or not, and inherent in our DNA is design to return us home – home to our true essence, our greatest self, our limitless self.”

Debbie Ford

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmirrahiim

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengungkapkan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah pada junjungan kita semua baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang mengajarkan umat agar selalu berjuang dalam setiap langkah kebaikan.

Ucapan syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT atas bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Respon TKI terhadap Perlindungan Sosial Formal TKI (Studi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah)” skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1). Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penyusun dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Andayani, MSW., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih atas segala bantuan yang diberikan sehingga proses penulisan skripsi dapat berjalan dengan lancar.
2. Ibu Abidah Muflihati, S.Th.I, M.Si., Selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa menasihati, memberikan pengertian, kemudahan, dan kelancaran dari semester 1 hingga selesainya penyusunan skripsi.

3. Ibu Noorkamilah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, beribu-ribu terimakasih atas bimbingan, arahan dan semangat dalam dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Terimakasih, Ibun.
4. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang telah mendidik sepenuh hati.
5. Seluruh staf bagian akademik yang telah mengkoordinir segala keperluan peneliti dalam urusan akademik dan selama peneliti menyusun skripsi ini.
6. Seluruh informan yang telah memberikan dukungan data dan informasi dalam penyelesaian penulisan skripsi.
7. Bapak dan Mama, selaku orang tua tercinta yang telah mendukung dengan doa-doa dan pembiayaan selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi.
8. Mbak Awalia dan adek Rania terima kasih atas dukungan dan *bully*-annya. You both make day so colorful, thankiss :*
9. Semua teman-teman Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2013.
10. Sahabat positifku, Ema, Desi dan Rani terimakasih semangat dan kasih sayang positif yang selalu kalian berikan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan menjaga tali silaturahmi yang sudah terjalin. Aamiin.
11. Sahabat akhir masa, Indah dan Deby terimakasih kita bersama saling memberi dukungan sampai di titik akhir ini. Semoga “kita” tetap ada sampai kapanpun.
12. Serta semua pihak yang membantu dalam proses penyelesaian karya skripsi hingga selesai dengan maksimal yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dalam penulisan karya skripsi ini sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dalam penulisan karya dikemudian hari yang lebih baik. Demikian kata pengantar dan ucapan terimakasih penulis kepada pihak-pihak yang terlibat, semoga karya skripsi ini menjadi bermanfaat kepada pembaca.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018
Penulis,

Dwita Choerunisa
NIM. 13250069

ABSTRAK

Dwita Choerunisa, 13250069 dengan judul skripsi Respon TKI terhadap Perlindungan Sosial Formal TKI (Studi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah).

Tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan isu yang masih ramai dibicarakan. Hal ini dikarenakan angka TKI yang masih tinggi dan juga permasalahan TKI tinggi pula. Kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya upah di Indonesia merupakan salah satu faktor tingginya angka TKI. Sedangkan ekonomilah yang menjadi faktor utama masyarakat memilih bekerja sebagai TKI. Namun dengan tingginya angka TKI menyebabkan permasalahan TKI cukup tinggi pula, mulai dari keberangkatan ilegal melalui calo, PHK sepihak, kekerasan oleh majikan bahkan sampai terlibat kasus hukum. Oleh karena masalah TKI yang cukup tinggi maka perlunya peran pemerintah dalam perlindungan TKI.

Jenis perlindungan yang ada salah satunya adalah perlindungan sosial formal. Perlindungan sosial formal adalah perlindungan sosial yang diberikan kepada seseorang yang bekerja kepada seseorang atau perusahaan; ada yang bekerja dan pemberi upah atau gaji. Dilihat dengan adanya jenis perlindungan sosial formal dan dikaitkan dengan masalah TKI yang ada maka TKI berhak mendapatkan perlindungan tersebut.

Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan sosial formal yang diberikan kepada TKI dan respon TKI terhadap perlindungan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang disajikan secara deskriptif dengan mengambil lokasi penelitian yaitu kabupaten Cilacap karena Cilacap merupakan kabupaten pengiriman TKI tertinggi di Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial formal TKI yang diberikan oleh pemerintah meliputi pembekalan akhir pemberangkatan, bantuan dana tanggap darurat, asuransi TKI, BPJS TKI, layanan *crisis centre*, pemberdayaan purna TKI dan program desa migran produktif. Adapun respon TKI terhadap perlindungan sosial meliputi efek kognitif positif, afektif negatif dan konatif negatif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa respon TKI terhadap perlindungan sosial formal adalah negatif karena lebih banyak efek negatif yang diberikan oleh TKI. Respon negatif ini mengindikasikan bahwa tidak adanya perubahan pada diri TKI dengan adanya perlindungan sosial formal tersebut.

Kata kunci: perlindungan sosial, respon, TKI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Kerangka Pemikiran.....	22
H. Metode Penelitian	24
I. Sistematika Pembahasan	28

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN CILACAP DAN INSTANSI PERLINDUGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI KABUPATEN CILACAP

A. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap	30
1. Keadaan Geografis	30
2. Pemerintahan.....	32
3. Kependudukan	33
4. Ekonomi dan Pariwisata	36
5. Pendidikan	40
6. Ketenagakerjaan	41
B. Gambaran Umum Disnakerin Kabupaten Cilacap	44
1. Profil Disnakerin Kabupaten Cilacap.....	44
2. Visi dan Misi Disnakerin Kabupaten Cilacap	44
3. Tugas Pokok dan Fungsi Disnakerin Kabupaten Cilacap	45
4. Struktur Organisasi Disnakerin Kabupaten Cilacap.....	46
C. Gambaran Umum P4TKI Cilacap	47
1. Profil P4TKI Cilacap	47
2. Tugas Pokok dan Fungsi P4TKI Cilacap.....	48
3. Struktur Organisasi P4TKI Cilacap	49

BAB III PERLINDUNGAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA

A. Bentuk Perlindungan Sosial Formal Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	52
1. Bantuan Sosial	53
a. Program Pembekalan Akhir Pemberangkatan	54
b. Bantuan Dana Tanggap Darurat.....	57
c. Program Desa Migran Produktif	59

d. Program Pemberdayaan Purna TKI	63
2. Jaminan Sosial	66
a. Asuransi TKI.....	66
b. Bantuan Program Jaminan Sosial (BPJS TKI)	70
3. Advokasi Sosial	72
4. Bantuan Hukum	76
B. Respon TKI terhadap Perlindungan Sosial Formal TKI	78
1. Efek Kognitif	79
2. Efek Afektif	83
3. Efek Konatif	85
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1	25 Kab/Kota Terbesar Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia Periode 2016	4
1.2	Pengaduan Masalah TKI berdasarkan Jenis Masalah Januari sampai November tahun 2016	6
2.1	Penggunaan Lahan di Kabupaten Cilacap	31
2.2	Jumlah Kecamatan dan Angka Pemberangkatan TKI Tahun 2016	32
2.3	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Cilacap 2013-2016.....	33
2.4	Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan di Kabupaten Cilacap 2010-2016	34
2.5	Kepadatan Penduduk Kabupaten Cilacap 2010-2016 (penduduk/km ²)....	35
2.6	25 Kab/Kota Terbesar Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia Periode 2016	36
2.7	Realisasi Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2016	38
2.8	Obyek Wisata Kabupaten Cilacap tahun 2016	40
2.9	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Cilacap 2010-2016	40
2.10	Banyaknya Penyaluran Tenaga Kerja ke Luar Daerah/ Luar Negeri tahun 2015	42
2.11	Negara Penempatan TKI Kabupaten Cilacap Januari sampai Juli 2017....	43
2.12	Angka Pemberangkatan TKI Kabupaten Cilacap	43
3.1	Rekapitulasi Penanganan Permasalahan TKI Tahun 2016	74
3.2	Perlindungan Sosial Berdasarkan Waktu Penerimaan	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu isu ketenagakerjaan yang ramai dibicarakan. Karena jumlah TKI yang bekerja di luar negeri masih cukup tinggi dan jumlah masalah TKI pun masih tinggi. Pada tahun 2016, TKI yang diberangkatan ke luar negeri berjumlah 212.900 jiwa.¹ Sedangkan laporan masalah yang tercatat berjumlah 4.460 laporan, dengan jumlah laporan terbanyak berasal dari TKI Malaysia sebanyak 1.414 laporan diikuti oleh Saudi Arabia dengan laporan sebanyak 1.084 laporan.² Jumlah tersebut adalah jumlah laporan yang tercatat secara resmi, belum lagi masalah yang belum tercatat dan dilaporkan.

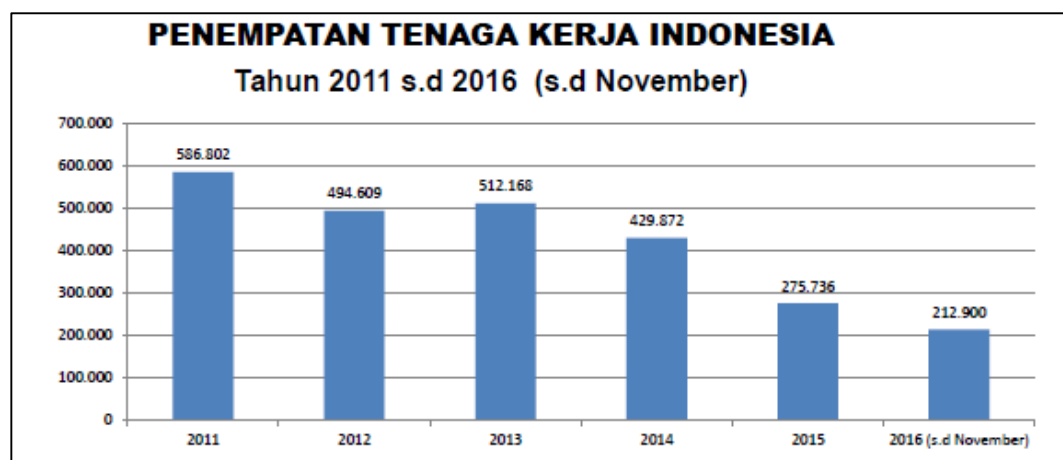
Kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya upah di Indonesia dianggap menjadi faktor tingginya angka minat menjadi TKI. Adanya penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri merupakan salah satu dampak globalisasi, yaitu migrasi tenaga kerja internasional. Sehingga orang non pribumi berhak bekerja di negara yang bersangkutan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

¹ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode November 2016*, (Jakarta: BNP2TKI, 2016), hlm. 3.

² *Ibid.*, hlm. 35.

Bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memang dirasa menjadi solusi yang paling tepat mengingat kurangnya peluang kerja di Indonesia sedangkan kebutuhan hidup semakin meningkat. Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang bekerja ke luar negeri, namun faktor ekonomilah yang seringkali menjadi faktor pendorong utama untuk mencari pekerjaan di luar negeri.³ Bila dilihat lagi bahwa kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan yang semakin tinggi, maka tidak heran banyak yang memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dibanding menganggur di negara sendiri.

Gambar 1.1
Grafik Penempatan Tenaga Kerja Indonesia⁴



Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI tahun 2016

Jumlah TKI di luar negeri masih cukup tinggi setiap tahunnya, meski dalam kurun waktu beberapa tahun ini mengalami penurunan. Menurut data

³ Rosanto Dwi Handoyo, dkk, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm. 6.36.

⁴ *Ibid.*

dari Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Puslitfo BNP2TKI) jumlah TKI menurun dari tahun 2015 berjumlah 253.688 pekerja menjadi 212.900 pekerja di tahun 2016. Jumlah penurunan di tahun 2016 cukup drastis, dimana per tahun 2011 jumlah TKI masih berjumlah 586.802 pekerja.⁵

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masih cukup tinggi tentu akan menguntungkan bagi negara. Karena dengan tingginya jumlah TKI yang berada di luar negeri, hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya devisa negara. Pada tahun 2015, sumbangan devisa negara oleh TKI mencapai angka 144,95 Triliun.⁶ Angka yang tentunya tidak sedikit untuk menyokong perekonomian Indonesia.

Meski di satu sisi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dianggap sebagai solusi, tapi di sisi lain TKI juga menimbulkan beberapa masalah, di antaranya adalah TKI ilegal, gaji yang tidak dibayarkan, tindakan kekerasan oleh majikan, pelecehan seksual sampai kasus hukum yang dilakukan TKI di negara yang bersangkutan. Turunnya jumlah TKI juga tidak membuat kasus atau permasalahan TKI menurun. Sehingga pemerintah perlu turun tangan dalam permasalahan terkait tenaga kerja Indonesia dalam aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-

⁵ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan...*, hlm. 3.

⁶ Kurniasih Miftakhul Jannah, “TKI Sumbang Devisa Negara Rp144,95 Triliun di 2015” dalam <http://economy.okezone.com/read/2016/01/12/320/1286255/tki-sumbang-devisa-negara-rp144-95-triliun-di-2015> (diakses pada 11 Januari 2017).

pihak terkait, khususnya TKI dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).⁷

Tabel 1.1
25 Kab/Kota Terbesar Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Indonesia
Periode 2016⁸

No	Kab-Kota	2016	No	Kab-Kota	2016
		Jan-Nov			Jan-Nov
1.	Lombok Timur	18.139	14.	Banyuwangi	3.710
2.	Indramayu	15.128	15.	Banyumas	3.143
3.	Lombok Tengah	10.135	16.	Madiun	3.123
4.	Cirebon (Kab)	9.144	17.	Cianjur	3.045
5.	Cilacap	8.488	18.	Malang	3.018
6.	Ponorogo	5.971	19.	Pati	3.008
7.	Subang	5.897	20.	Majalengka	2.962
8.	Kendal	5.749	21.	Karawang	2.555
9.	Lampung Timur	5.325	22.	Deli Serdang	2.272
10.	Lombok Barat	4.868	23.	Kediri	2.227
11.	Blitar	4.315	24.	Grobogan	2.225
12.	Tulungagung	4.266	25.	Lampung Tengah	2.106
13.	Brebes	3.870	26.	Lainnya	78.211
TOTAL		212.900			

Sumber: Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI tahun 2016

Salah satu kabupaten pengirim TKI terbesar di Indonesia adalah Cilacap, Jawa Tengah. Pada tahun 2016 Cilacap berada di urutan kelima nasional dan urutan pertama Jawa Tengah dalam penempatan TKI dengan jumlah TKI yang diberangkatkan sejumlah 8.488 pekerja.⁹ Pada tahun-tahun

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuahan, cet I.* (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hlm. 236.

⁸ TKI berasal dari 433 Kab/kota.

⁹ BN2PTKI, *Data Penempatan dan Perlindungan ...*, hlm. 5.

sebelumnya pun Cilacap menjadi kabupaten penempatan TKI terbesar di Jawa Tengah. Sudah lama Cilacap dikenal sebagai lumbung TKI, maka tidak heran bahwa jumlah TKI yang diberangkatkan dari Cilacap masih cukup tinggi.

Namun banyaknya jumlah TKI ternyata berbanding lurus dengan angka permasalahan yang dialami TKI. Pada tahun 2015, jumlah TKI asal Cilacap yang bermasalah menurut catatan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI dialami sebanyak 234 orang.¹⁰ Walaupun dengan jumlah tersebut, permasalahan TKI dari Cilacap tergolong tidak terlalu tinggi karena jumlah TKI yang diberangkatkan tinggi pula. Permasalahan yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Cilacap pun beragam, mulai dari gaji yang tidak dibayar, gaji dibawah standar, melarikan diri dari rumah majikan, jenis pekerjaan tak sesuai kontrak kerja, penganiyaan fisik, pelanggaran keimigrasian sampai tindak pidana perdagangan orang.¹¹

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebenarnya seringkali disebabkan mulai dari keberangkatan, antara lain dokumen-dokumen yang tidak lengkap dan pemberangkatan illegal melalui calo. Status tenaga kerja ilegal melalui calo kemudian menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sangat rentan mengalami permasalahan sosial-psikologis.¹² Terlebih apabila Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berstatus ilegal, maka saat TKI tersebut

¹⁰ “234 TKI Cilacap Bermasalah” dalam <http://radarbanyumas.co.id/234-tki-cilacap-bermasalah/> (diakses 16 Januari 2017).

¹¹ *Ibid.*

¹² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat cet. V*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 80.

mengalami masalah akan sulit diketahui oleh pemerintah karena status yang tidak terdaftar.

Tabel 1.2
Pengaduan Masalah TKI berdasarkan Jenis Masalah
Januari sampai November 2016¹³

No	Jenis Masalah	Jumlah Kasus
1	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	686
2	Meninggal dunia di negara tujuan	580
3	Gaji tidak dibayar	441
4	TKI ingin dipulangkan	327
5	Sakit	287
6	Putus hubungan komunikasi	233
7	Overstay	203
8	Pekerjaan tidak sesuai perjanjian kerja	170
9	TKI gagal berangkat	136
10	TKI tidak berdokumen	115
11	Tidak dipulangkan meski kontrak kerja selesai	114
12	Potongan gaji melebihi ketentuan	107
13	Ilegal rekrut calon TKI	98
14	Tindak kekerasan dari majikan	75
15	TKI mengalami kecelakaan	75
16	Perdagangan orang	54
17	TKI dalam tahanan/ proses tahanan	53
18	Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS	50
19	Unfit (pemalsuan sertifikat kesehatan atau tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan)	44
20	Melarikan diri dari rumah majikan	42
21	Penipuan peluang kerja	39
22	TKI tidak punya ongkos pulang	31
23	Konflik bersenjata	30
24	Gagal penempatan	29
25	Pemalsuan dokumen (KTP, ijazah, umur, ijin orang tua, dll)	25
26	Lainnya	416
JUMLAH TOTAL		4.460

Sumber: Data BNP2TKI November 2016

¹³ BNP2TKI, *Data Penempatan dan Perlindungan...*, hlm. 38.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menuntut pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat mengawasi TKI mulai dari pemberangkatan dari tanah air sampai nanti kembali. Oleh sebab itu perlu adanya peran pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk melakukan perlindungan kepada TKI baik pra pemberangkatan, selama di tempat kerja dan saat pemulangan agar angka TKI bermasalah dapat menurun.

Sebagai wujud perhatian pemerintah daerah kabupaten Cilacap terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Cilacap No. 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cilacap. Dalam Perda ini disebutkan berbagai perlindungan yang akan didapatkan oleh Tenaga Kerja Indonesia pra penempatan, saat berada di luar negeri dan purna penempatan/ pemulangan Tenaga Kerja Indonesia. Perlindungan yang ada antara lain perlindungan teknis, administratif, pemenuhan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia, dan lain lain.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa angka TKI yang diberangkatkan dari Kabupaten Cilacap cukup tinggi, begitu pula dengan permasalahan yang dilaporkan oleh TKI asal Cilacap juga tinggi dan beragam. Pemerintah daerah sendiri sudah mengeluarkan peraturan daerah tentang perlindungan TKI agar hak-hak TKI dapat dipenuhi. Maka dengan fakta-fakta yang terdapat di lapangan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Respon TKI terhadap Perlindungan Sosial Formal TKI (Studi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan sosial formal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Cilacap yang diberikan oleh pemerintah?
2. Bagaimana respon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Cilacap terhadap upaya perlindungan sosial formal TKI yang telah dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk perlindungan sosial formal TKI asal Cilacap yang dilakukan baik pra pemberangkatan, masa kerja dan purna kerja.
2. Mengetahui respon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Cilacap terhadap upaya perlindungan sosial formal TKI yang telah dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Memberikan informasi mengenai perlindungan sosial formal yang sudah diberikan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, baik pada pra pemberangkatan, masa kerja dan purna kerja.

2. Manfaat teoritis

Menambah referensi pengetahuan dan wawasan di dalam kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dalam mata kuliah Perundang-undangan Sosial dan Sistem Pelayanan Sosial tentang perlindungan sosial TKI.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang perlindungan sosial Tenaga Kerja Indonesia belum banyak diteliti. Sejauh ini lebih banyak yang meneliti tentang perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia, bukan tentang perlindungan sosialnya. Namun

peneliti menemukan beberapa penelitian serupa dengan tema perlindungan sosial dan Tenaga Kerja Indonesia yang sudah diteliti sebelumnya.

Pertama, skripsi karya Wisnu Kawiryan yang berjudul “*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan*”.¹⁴ Skripsi ini meneliti tentang perlindungan yang telah dilakukan oleh BP3TKI untuk calon TKI sebelum pemberangkatan yang meliputi sosialisasi PTKLN, pengurusan dan verifikasi dokumen tenaga kerja di luar negeri, memberi pembekalan sebelum keberangkatan berkoordinasi dengan PPTKIS, juga melayani pengaduan tentang masalah yang dihadapi CTKI/TKI. Kemudian dalam skripsi ini juga dijelaskan faktor-faktor, baik internal dan eksternal yang mempengaruhi BP3TKI dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada masa pra penempatan TKI.

Kedua, jurnal karya Reni Susetyorini yang berjudul “*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia*”. Jurnal ini meneliti tentang perlindungan TKI yang dilakukan oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI di Departemen Luar Negeri. Perlindungan yang diberikan terdapat tiga perlindungan, yaitu perlindungan teknis, yuridis dan politis. Perlindungan teknis yang dimaksudkan adalah dengan penyediaan rumah singgah aman dan repatriasi serta Kedubes menjadi fasilitator dengan melakukan rehabilitasi apabila ada TKI yang

¹⁴ Wisnu Kawiryan, “*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Perlindungan pada Masa Pra Penempatan*”, Skripsi (Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2015).

bermasalah. Perlindungan yuridis diberikan dalam bentuk bantuan hukum dan pemantaun kepada TKI yang bermasalah. Sedangkan perlindungan politis diberikan dengan cara pembuatan nota kesepahaman antara pemerintah RI dengan negara penerima mengenai penempatan TKI.¹⁵

Ketiga, jurnal karya Herdy L. N. Pihang berjudul “*Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita*”. Dalam jurnal ini meneliti tanggung jawab PJTKI terhadap TKW dan perlindungan PJTKI terhadap TKW. Dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap TKW, PJTKI diwajibkan memiliki SIUP-PJTKI oleh Direktorat Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja oleh Menteri. PJTKI melakukan koordinasi dengan Calon TKI (CTKI) dan pemerintah untuk dapat mengirim TKI. Sebelum pemberangkatan PJTKI harus memfasilitasi pendidikan dan ketrampilan kepada CTKI di Balai Latihan Ketrampilan (BLK) dan Balai Latihan Ketrampilan Nasional (BLKN) yang dikelola oleh PJTKI itu sendiri. Sedangkan dalam perlindungan TKI dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral antara pemerintah baik pusat maupun daerah, partisipasi masyarakat dan PJTKI. Perlindungan meliputi perlindungan pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.¹⁶

Ketiga kajian tersebut meneliti tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Penelitian pertama yang berjudul *Perlindungan*

¹⁵ Peni Susetyorini, “*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia*”, MMH, Jilid 39 No. 1, Maret 2010.

¹⁶ Herdy L. N. Pihang. “*Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita*”, Lex Et Societalis Vol. I No. 5, September 2013.

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan meneliti perlindungan pra penempatan TKI yang diberikan oleh BP3TKI, perlindungan ini bersifat perlindungan yang menyeluruh sedangkan peneliti akan melakukan penelitian yang berfokus pada perlindungan sosial TKI. Penelitian kedua yang berjudul *Perlindungan Tenaga Kerja Indoneisa (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia* meneliti tentang perlindungan hukum TKI yang dilakukan oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI di Departemen Luar Negeri. Penelitian ketiga yang berjudul *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita* meneliti tentang perlindungan TKW yang kaitannya dengan tanggung jawab PJTKI. Sedangkan posisi peneliti dalam penelitian ini tentang perlindungan sosial formal TKI dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Cilacap.

F. Kerangka Teori

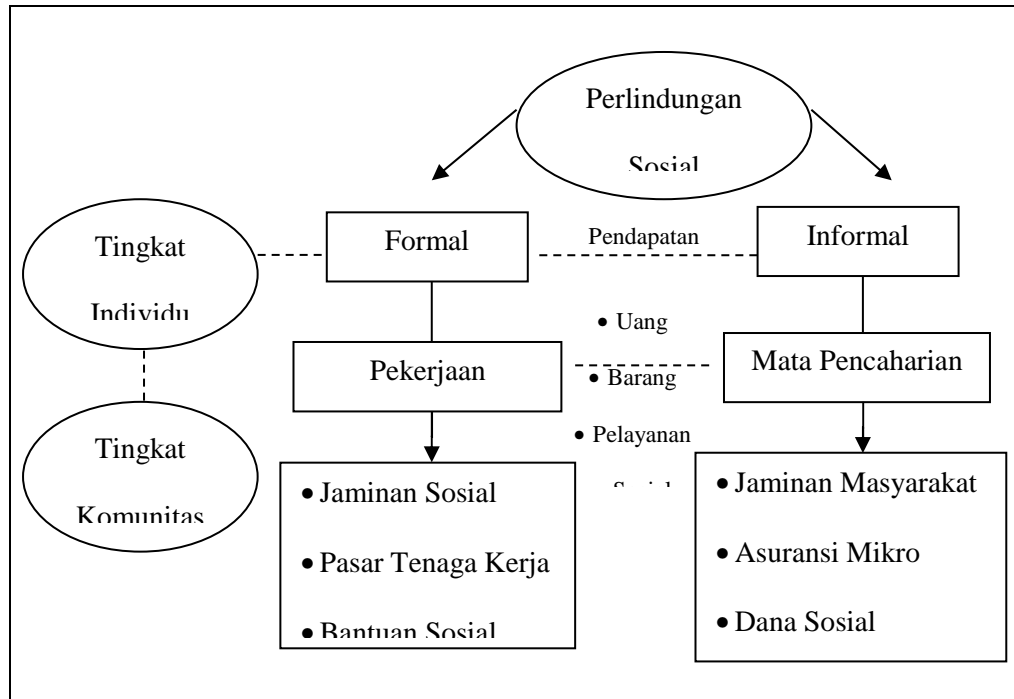
1. Teori Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.¹⁷

Perlindungan sosial dibagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan sosial formal dan informal. Lebih lanjut jenis perlindungan sosial digambarkan dalam ilustrasi berikut:

¹⁷ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Cet. II*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 42.

Gambar 1.2
Perlindungan Sosial Formal dan Non Formal¹⁸



Sumber: Edi Suharto 2013

Pada skema di atas disebutkan perlindungan sosial dibagi menjadi dua, yaitu sektor formal dan sektor informal. Sektor formal merujuk pada hubungan antara pekerja dengan pemilik usaha yang memberikan upah (*waged employment*). Sedangkan sektor informal merujuk pada mereka yang tidak terlibat pada hubungan pengupahan (*non-waged employment*), antara lain wiraswasta, buruh harian, usaha yang dijalankan oleh keluarga, mempekerjakan anggota keluarga tanpa dibayar (*unpaid family worker*).¹⁹

Kemudian secara konseptual, perlindungan sosial dapat dikelompokkan menjadi tiga model, yaitu:

a. Bantuan sosial (*social assistance*);

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 146-147.

- b. Asuransi sosial (*social insurance*);
- c. Jaminan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (*community-based social security*).²⁰

Bantuan sosial merupakan skema publik yang diberikan oleh negara kepada warganya, terutama kelompok yang kurang beruntung. Bantuan sosial biasanya didanai dari pajak dan diberikan tanpa memperhatikan penerima memberi kontribusi premi atau tidak.²¹ Bentuk-bentuk bantuan sosial meliputi transfer uang atau barang; pelayanan sosial atau kesejahteraan berupa konseling, penyuluhan atau program; subsidi kontemporer; dan skema pengamanan sosial.²²

Asuransi sosial adalah perlindungan sosial yang diselenggarakan dengan mekanisme *risk sharing across population* yang berarti penanganan resiko dihadapi secara gotong-royong oleh para pesertanya melalui pengelolaan dana pertanggungan yang dikumpulkan dari kontribusi premi. Dalam penyelenggaraan asuransi sosial umumnya mensyaratkan bahwa para peserta memiliki sumber penghasilan yang relatif tetap dan sebagiannya dapat disisihkan untuk membayar premi.²³ Program asuransi sosial meliputi asuransi atau tunjangan pengangguran untuk menghadapi keadaan tidak

²⁰ *Ibid.*, hlm. 157.

²¹ *Ibid.*

²² Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan...*, hlm. 48.

²³ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial...*, hlm. 157.

adanya kesempatan kerja akibat faktor struktural maupun situasional; asuransi kecelakaan kerja untuk memberi kompensasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan atau sakit terkait pekerjaannya; asuransi kecatatan atau ketidakmampuan kerja yang biasanya dikaitkan dengan pensiun hari tua atau memberi kompensasi sebagian atau seluruh kerugian akibat kecatatan; asuransi kesehatan untuk melindungi orang lain dari penyakit atau kehilangan pendapatan/ aset akibat mengalami sakit; asuransi hari tua untuk memberikan tunjangan penghasilan setelah pensiun; dan asuransi kelangsungan hidup yang dapat menjamin keluarga atau anak-anak yang menjadi tanggungan hidup layak akibat pencari nafkah utama meninggal atau kehilangan penghasilan akibat kecatatan permanen.²⁴

Jaminan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat atau yang biasa disebut sebagai skema mikro berbasis masyarakat adalah perlindungan sosial informal yang dikembangkan untuk merespon beberapa kekurangan yang ada pada skema formal.²⁵ Beberapa perlindungan sosial mikro berbasis komunitas meliputi asuransi mikro, asuransi pertanian, dana sosial berbasis masyarakat dan manajemen kebencanaan.²⁶

²⁴ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan...*, hlm. 47.

²⁵ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial...*, hlm. 157.

²⁶ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan...*, hlm. 48-49.

2. Tinjauan Perlindungan Sosial menurut Undang-Undang Kesejahteraan Sosial

Pada Undang-Undang no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam pasal 14 dijelaskan perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Dalam Undang-Undang no. 11 tahun 2009 perlindungan sosial dilaksanakan melalui:

- a. Bantuan sosial;
- b. Advokasi sosial;
- c. Bantuan hukum.

Jenis-jenis perlindungan sosial yang disebutkan dalam pasal 14 kemudian dijelaskan dalam pasal selanjutnya. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan atau kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.²⁷ Dalam hal ini berarti bantuan sosial dimaksudkan untuk mengurangi resiko dalam guncangan sosial yang mungkin akan terjadi. Bentuk-bentuk bantuan sosial yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan langsung;
- b. Penyediaan aksesibilitas; dan/atau

²⁷ Undang-undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 15 ayat 1.

c. Penguatan kelembagaan.²⁸

Sedangkan yang dimaksudkan advokasi sosial adalah untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.²⁹ Sementara jenis perlindungan sosial yang terakhir adalah bantuan hukum. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun luar pengadilan.³⁰ Bentuk bantuan hukum yang dimaksud adalah pembelaan dan konsultasi hukum.³¹

3. Tinjauan tentang Tenaga Kerja Indonesia

Ada beberapa pengertian tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI), salah satunya adalah yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia

²⁸ *Ibid.*, pasal 15 ayat 2.

²⁹ *Ibid.*, pasal 16.

³⁰ *Ibid.*, pasal 17 ayat 1.

³¹ *Ibid.*, pasal 17 ayat 2.

adalah semua warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, entah bekerja sebagai apapun disebut sebagai TKI.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berkaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia, pemerintah juga memiliki tugas untuk dapat melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja.³² Lebih lanjut, pemerintah memiliki tugas, tanggungjawab dan kewajiban untuk melindungi TKI yang dicantumkan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalam perlindungan TKI pemerintah bertugas untuk mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI. Dalam tugasnya ini, pemerintah dapat melimpahkan

³² Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

tugasnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³ Pemerintah juga bertanggungjawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, pemerintah berkewajiban:

- a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun berangkat secara mandiri;
- b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
- c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
- d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
- e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.³⁴

Selain pemerintah yang memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi TKI, TKI sendiri juga memiliki hak yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak dan kewajiban TKI tersebut disebutkan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Setiap calon TKI dan TKI berhak dan berkesempatan untuk:

³³ *Ibid.*, pasal 5.

³⁴ *Ibid.*, pasal 7.

- a. Bekerja di luar negeri;
- b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
- c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
- d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan agama dan keyakinan yang dianutnya;
- e. Memperoleh upah yang sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
- f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
- g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. Memperoleh naskah perjanjian kerja asli.³⁵

Sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon TKI maupun TKI adalah sebagai berikut:

³⁵ *Ibid.*, pasal 8.

- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberangkatan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.³⁶

4. Tinjauan tentang Respon

Makna respon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tanggapan, reaksi, jawaban, terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.³⁷ Sedangkan dalam Kamus Komunikasi, *response* (tangapan/respons) adalah sikap atau perilaku seseorang dalam proses komunikasi ketika menerima suatu pesan yang ditujukan kepadanya.³⁸ Dalam sumber lain, respon diartikan sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku sebelumnya (tangapan).³⁹ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, respon adalah sebuah tindakan atau sikap yang ditunjukkan oleh seseorang setelah mendapatkan perlakuan atau hal tertentu.

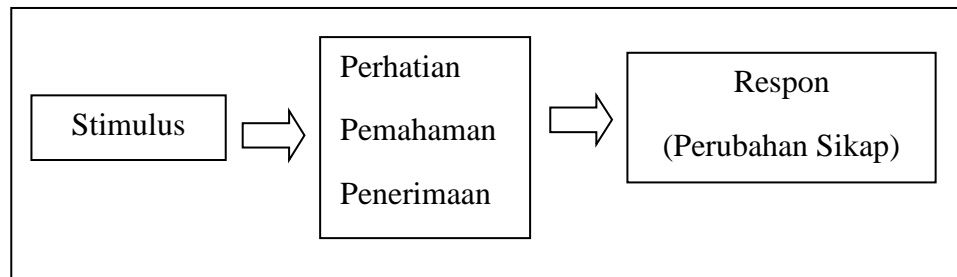
³⁶ *Ibid.*, pasal 9.

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 838.

³⁸ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, (Jakarta: Mandar Maju, 1989), hlm. 314

³⁹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 303

Gambar 3
Langkah–langkah Perubahan Sikap menurut Model Hovland, Janis dan Kelley⁴⁰



Sumber: Saifuddin Azwar, 1995

Dari proses pembentukan respon (perubahan sikap) menurut Model Hovland, seseorang harus diberi stimulus terlebih dahulu kemudian stimulus tersebut diserap menjadi perhatian, pemahaman dan/atau penerimaan. Penyerapan stimulus tersebut nantinya yang akan berubah menjadi respon atau perubahan sikap.

Dalam kajian komunikasi, rangsangan-rangsangan yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap disebut efek dari komunikasi. Menurut Soyomukti Nurani efek ini dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Kognitif

Efek kognitif adalah respon yang mengakibatkan orang menjadi tahu akan sesuatu. Berarti dalam konteks ini, efek yang dihasilkan adalah informasi.

b. Afektif

Efek afektif adalah respon yang mengakibatkan perubahan perasaan dan sikap pada diri informan. Sikap yang ditunjukkan oleh

⁴⁰ Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya* Edisi ke 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 65.

informan meliputi setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka dan lain sebagainya.

c. Konatif

Efek konatif adalah respon yang berupa tingkah laku dan tindakan.

Dari informasi atau stimulus yang diberikan oleh informan akan memberikan efek tindakan yang nyata.⁴¹

Dalam proses komunikasi, respon dikenal dengan istilah umpan balik atau arus balik (*feedback*). Onong Uchjana Effendy membagi umpan balik menjadi dua yaitu, umpan balik positif dan umpan balik negatif. Umpan balik positif adalah tanggapan atau respon atau reaksi komunikan yang menyenangkan komunikator, sehingga komunikasi berjalan lancar. Sebaliknya, umpan balik negatif adalah tanggapan komunikan yang tidak menyenangkan komunikatornya, sehingga komunikator enggan untuk melanjutkan komunikasinya.⁴²

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa respon yang terjadi akibat pesan kepada komunikan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Respon Positif, adalah reaksi yang diterima oleh seseorang dapat diterima dan membawa pengaruh positif pada diri orang tersebut.

⁴¹ Nurani Soyomukti, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2010), hlm. 64-65

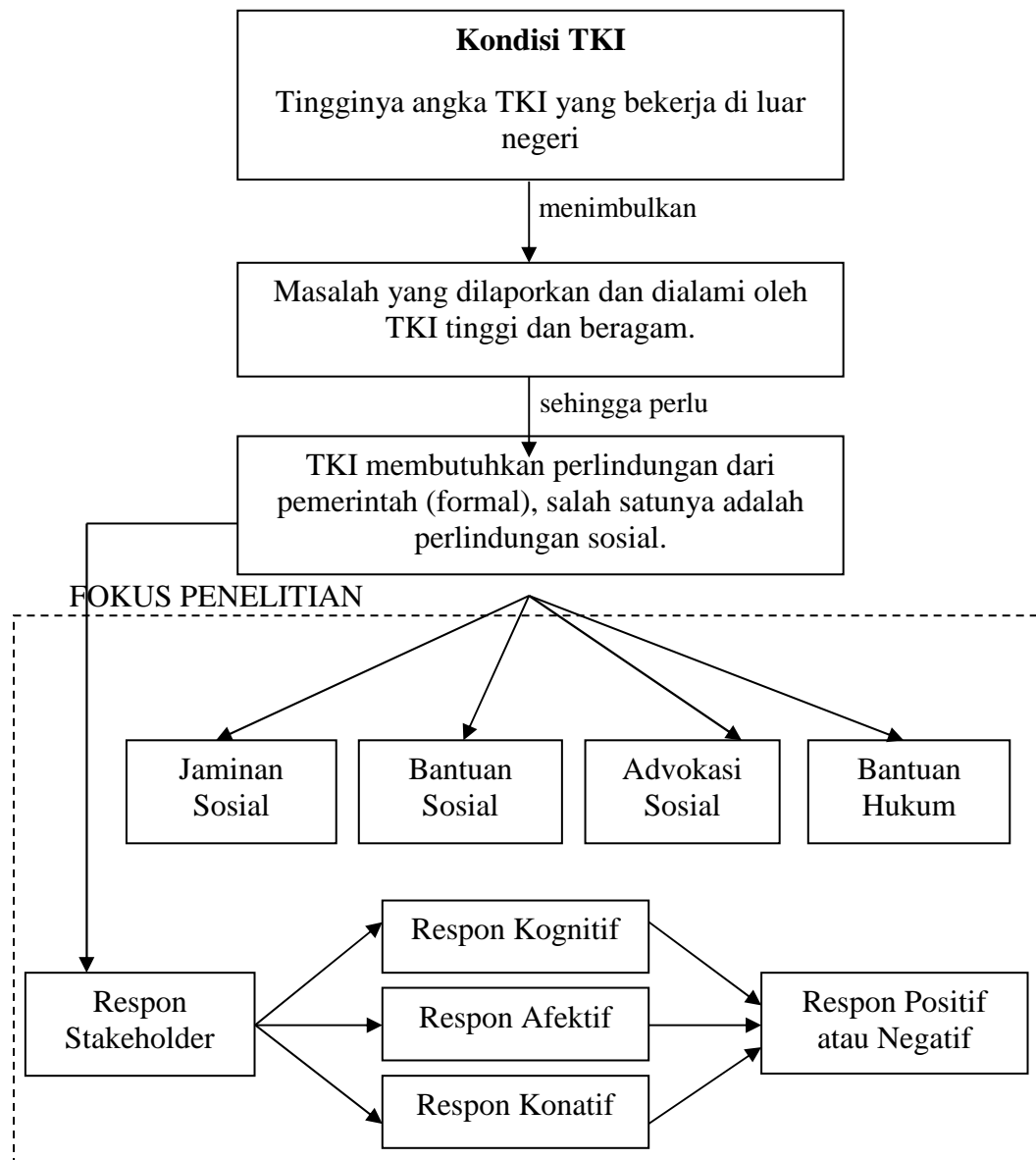
⁴² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 1986), hlm. 19.

- b. Respon Negatif, adalah reaksi yang tidak dapat diterima seseorang dan cenderung tidak membawa pengaruh pada diri orang tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah, diketahui bahwa jumlah TKI yang bekerja di luar negeri sampai saat ini angkanya masih cukup tinggi. Begitu pula masalah yang dialami TKI juga tinggi dan beragam, mulai dari TKI ilegal, gaji yang tidak dibayarkan, gaji di bawah standar, melarikan diri, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, penganiayaan fisik, pelanggaran keimigrasian sampai *human trafficking*. Dengan banyaknya permasalahan yang dialami oleh TKI perlunya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan TKI bukan hanya kewajiban pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga berkewajiban menjamin perlindungan terhadap TKI. Salah satu perlindungan yang ada adalah perlindungan sosial. Berdasarkan tinjauan teori di atas jenis-jenis perlindungan sosial meliputi bantuan sosial, asuransi sosial, jamkesmas masyarakat, advokasi sosial dan bantuan hukum.

Penelitian ini akan meneliti bagaimana pemerintah menjalankan perlindungan sosial formal kepada TKI berdasarkan jenis-jenis perlindungan sosial seperti di atas dan bagaimana respon stakeholder terhadap perlindungan sosial tersebut, positif atau negatif. Penelitian akan dilakukan dengan mengambil lokasi di kabupaten Cilacap, Jawa Tengah karena Cilacap merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah TKI yang tinggi.



H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kabupaten Cilacap. Cilacap merupakan kabupaten dengan jumlah TKI tertinggi di Jawa Tengah dan urutan kelima di Indonesia. Dengan tingginya angka TKI dari Cilacap ini

juga yang menjadi alasan untuk dijadikan lokasi penelitian tentang perlindungan sosial formal TKI.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat deskriptif mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan/memecahkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴³

3. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah informan yang memberikan keterangan terkait pembahasan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bapak Sutiknyo, Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap.
2. Ibu Ervi Kusuma, koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) Kabupaten Cilacap.
3. Ibu Tun Habibah, ketua Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI) Kecamatan Nusawungu, Cilacap.
4. Ibu Kurniasih, petugas Desmigratif desa Widara Payung Wetan.
5. Mbak Ita, pegawai asuransi mitra TKI yang berkantor di P4TKI.

⁴³ Usman Rainse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* Cetakan ke 3, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 30.

6. Erwin dan Ardi, TKI asal Cilacap.

Sedangkan objek penelitian ini adalah perlindungan sosial formal untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah diberikan oleh instansi pemerintah sebagai pelaksana tugas perlindungan sosial formal TKI.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam (*depth interview*) yang bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya) informan yang dihadapi.⁴⁴

b. Observasi

Metode observasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁴⁵ Observasi dilakukan dengan

⁴⁴ M. Djunaidi Ghoni & Fauzan AlManshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), hlm. 177.

⁴⁵ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 79.

melakukan pengamatan pada beberapa program perlindungan sosial formal yang dijalankan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat arsip-arsip, surat maupun dokumen lain yang mendukung penelitian, seperti koran, majalah, artikel, dan juga buku-buku yang berhubungan dengan hal yang dikaji dalam penelitian. Dokumentasi diambil dari data arsip yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) Cilacap dan PJTKI.

5. Metode Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini dilakukan terus-menerus selama kegiatan penelitian berlangsung.⁴⁶

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti dapat memahami apa

⁴⁶ M. Djunaidi Ghoni & Fauzan AlManshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), hlm. 307.

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian tersebut.⁴⁷

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah mengelola makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekuatannya dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.⁴⁸

6. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali pada sumber yang sama dalam kurun waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda.⁴⁹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun agar memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, yang disusun sebagai berikut:

Bab I, membahas tentang pendahuluan, di dalam pendahuluan dijelaskan alasan pentingnya membahas tema yang akan diteliti, yaitu Perlindungan Sosial Formal Tenaga Kerja Indonesia. Latar belakang dari timbulnya permasalahan yang sedang diangkat dikaji dalam tema penelitian kemudian didukung dengan kerangka teori sebagai dasar dalam menjelaskan jabaran dari rumusan masalah, serta metode penelitian untuk mengkaji tema yang diangkat serta sistematika pembahasan penelitian.

⁴⁷ Ibid., hlm. 308.

⁴⁸ Ibid., hlm. 210.

⁴⁹ Ibid., hlm . 318.

Bab II, dalam bab ini memaparkan gambaran umum tentang objek penelitian yaitu gambaran umum Kabupaten Cilacap dan instansi perlindungan TKI di bawah pemerintah yang berada di Kabupaten Cilacap yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Cilacap dan Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI).

Bab III, dalam bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai perlindungan sosial formal TKI dan respon TKI dengan adanya perlindungan sosial TKI berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab IV, merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.

Bagian akhir dari penelitian ini adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran data, foto ataupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Studi di Kabupaten Cilacap) maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari pembahasan sebelumnya yaitu jenis-jenis perlindungan sosial yang diberikan kepada TKI dan respon TKI terkait perlindungan sosial yang sudah dibuat oleh pemerintah. Berikut jenis-jenis perlindungan sosial yang diberikan kepada TKI:

1. Perlindungan sosial pra penempatan TKI yaitu perlindungan yang diberikan kepada CTKI yang belum bekerja di negara tujuan. Perlindungan yang diberikan kepada TKI saat pra penempatan yakni Program Akhir Pemberangkatan, Asuransi TKI pra, BPJS TKI pra dan layanan *crisis center*.
2. Perlindungan sosial masa penempatan TKI yaitu perlindungan yang diberikan kepada TKI pada masa bekerja di luar negeri. Perlindungan sosial yang diberikan yakni bantuan tanggap darurat, layanan *crisis center*, asuransi dan BPJS masa penempatan.
3. Perlindungan sosial purna penempatan TKI yaitu perlindungan yang diberikan kepada TKI saat TKI sudah berada kembali di Indonesia atau sudah selesai bekerja di luar negeri. Perlindungan sosial yang diberikan yaitu program pemberdayaan, layanan program

desmigratif, bantuan tanggap darurat, layanan *crisis center* serta asuransi dan BPJS purna TKI.

Sedangkan respon yang diberikan TKI terkait perlindungan sosial TKI bernilai negatif karena program-program yang ada tidak memberikan pengaruh pada diri TKI. Hal ini mungkin dapat berbeda apabila informan merupakan TKI purna yang menjalani program pemberdayaan purna TKI dan berada di desa migran produktif begitu pula apabila informan adalah TKIB yang mendapatkan layanan perlindungan dari P4TKI ataupun BNP2TKI.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian terkait perlindungan sosial TKI, maka peneliti berusaha memberikan masukan kepada pemerintah dan TKI agar program perlindungan sosial TKI dapat berjalan lebih baik. Berikut saran dari peneliti:

1. Perlunya sosialisasi ke masyarakat terkait program-program yang sudah dibentuk dapat diketahui oleh masyarakat, khususnya kepada TKI sehingga TKI mengetahui ada program-program yang dapat melindungi TKI. Karena dari hasil penelitian peneliti, TKI tidak mengetahui program-program TKI purna dan program desa migran produktif. Bahkan program dana tanggap darurat yang bisa digunakan oleh TKI saat terkena masalah pun TKI tidak tahu. Sehingga sosialisasi sangat diperlukan agar perlindungan sosial yang dibentuk oleh pemerintah dapat berjalan maksimal. Atau mungkin bisa diberikan saat mengikuti PAP, CTKI

diberikan materi tentang perlindungan-perlindungan yang dapat bermanfaat untuk TKI saat menemui masalah pada masa bekerja.

2. TKI perlu aktif bertanya kepada petugas saat membuat asuransi maupun BPJS sehingga TKI mengetahui manfaat dan alur klaim asuransi. Sehingga permainan dan penyalahgunaan dari pihak PPTKI dapat diminimalisir. Karena selama ini asuransi sering disalahgunakan oleh PPTKI.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Azwar, Saifuddin. 1995. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya* Edisi ke 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barthos, Basir. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia* Cet. 9. Jakarta: Bumi Aksara.

BNP2TKI. 2016. *Data Penempatan dan Perlindungan TKI Periode November 2016*, Jakarta: BNP2TKI.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djumialdji, FX. 2006. *Perjanjian Kerja* Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.

Effendy, Onong Uchjana. 1986. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakrya.

-. 1989. *Kamus Komunikasi*. Jakarta: Mandar Maju

Ghoni, M. Djunaidi & Fauzan AlManshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

Handoyo, Rosanto Dwi, dkk. 2008. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Huda, Ni'matul. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.

Iskandar, Muhaimin. 2014. *Pisau Bermakna Dua: Menuju Cita TKI yang Bermatabat dan Bermanfaat*. Jakarta: RMBOOKS.

Kansil, C.S.T. 2004. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mantra, Ida Bagoes. 2008. *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prajitno, Purbandi Hardjo, dkk. 2014. *Hukum Ketenagakerjaan* Cet. 2. Jakarta: Universitas Terbuka.

Rainse, Usman dan Abdi. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* Cet. 3. Bandung: Alfabeta.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 1984. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.

Soyomukti, Nurani. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

Suharto, Edi. 2013. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Cet. II*. Bandung: Alfabeta.

-. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat cet.5*. Bandung: Refika Aditama

Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika

Sumber Skripsi dan Jurnal:

Kawiryan, Wisnu. 2015. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: Kajian Perlindungan pada Masa Pra Penempatan*. Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Astawa, I Dewa Rai. 2006. *Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Semarang. Skripsi. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Susetyorini, Peni. 2010. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia*. Jurnal.

Sumber Peraturan:

Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia

Sumber Internet:

<http://bp3tkijateng.com/20-besar-penempatan-tki-asal-jateng-berdasarkan-negara-periode-2011-2013/>

<http://radarbanyumas.co.id/234-tki-cilacap-bermasalah/>

<http://economy.okezone.com/read/2016/01/12/320/1286255/tki-sumbang-devisa-negara-rp144-95-triliun-di-2015>

<http://www.liputanbmi.co.id/baca/1540>

<http://cilapkab.go.id/v2/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=6108>

www.kemendikbud.go.id/main/blog/2017/05/8-kementrian-sepakat-tingkatkan-perlindungan-tki-melalui-desa-migran-produktif